

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang jenis perubahan yang terjadi dalam struktur rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Simpasai sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah pilihan wanita bermigrasi ke Negara lain, dimana jenis-jenis perubahan itu adalah: (1) Ketidakutuhan keluarga, (2) Kehilangan sosok ibu/istri, (3) Tidak maksimalnya fungsi keluarga serta (4) kesejahteraan keluarga terancam. Pada bab ini juga akan membahas tentang aspek kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima didalam menangani perubahan yang terjadi dalam struktur rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Simpasai khususnya serta di Kabupaten Bima pada Umumnya. Aspek kebijakan ini mencakup tentang: (1) Akses ekonomi, (2) Akses terhadap pendidikan, (3) Akses terhadap pengambilan keputusan/kebijakan serta (4) tercapainya hak-hak perempuan tanpa diskriminasi.

V.1. Aspek Perubahan Sosial Keluarga Tenaga Kerja Wanita

Perubahan sosial terhadap keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah pilihan menjadi tenaga kerja di luar Negeri. Perubahan sosial yang terjadi tentunya tentunya beragam, ada perubahan yang positif seperti adanya perbaikan secara ekonomi dan perubahan yang negatif seperti adanya ketidakutuhan dalam keluarga diakibatkan karena perceraian dengan alasan tidak tercapainya kebutuhan biologis serta terlantarnya anak-anak yang ditinggal merantau oleh seorang ibu. Berikut ini adalah beberapa aspek perubahan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW).

V.1.1. Ketidakutuhan Keluarga.

Ada banyak dampak yang terjadi tentunya sebagai konsekuensi logis dari pilihan wanita menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar Negeri, salah satunya ketidakutuhan keluarga, seperti perceraian, sebagaimana data dari pengadilan Agama pada tahun 2015 ada sekitar 1.786 (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam) kasus perceraian di Kabupaten Bima (*kahaba.net.com*), Ada dua faktor utama yang melatarbelakangi

perceraian yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ditinggal pergi ke luar Negeri menjadi TKI/TKW. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs.H.Muhtar, sebagai panitera pengadilan Agama Kabupaten Bima, beliau mengatakan.

”Pada tahun 2015 banyak sekali kasus perceraian di Kabupaten Bima, ada dua kategori untuk kasus perceraian, yaitu jatuh talak oleh suami dan cerai tunggu atau yang permintaan perceraian yang dilakukan oleh seorang suami, ada dua alasan kuat yaitu karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan ditinggal pergi keluar Negeri oleh suami/istri, terkait dengan data berapa jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bercerai kami tidak memiliki data spesifiknya. (wawancara,19/07/2016 jam 10:13.)

Tabel.V.1.1.1.Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten

Bima tahun 2015:

Jumlah kasus perceraian	Motif perceraian
1.786 kasus perceraian	1. Kekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2. Ditinggal pergi merantau (dalam dan luar Negeri)

Sumber:kahaba.net.com

Berdasarkan keterangan pak Muhtar diatas, secara keseluruhan di Kabupaten Bima sendiri ada banyak kasus

perceraian yang dilatarbelakangi oleh dua indikator utama yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan ditinggal pergi keluar Negeri oleh suami/istri. Pada kesempatan wawancara tersebut peneliti sempat meminta data yang spesifik terkait dengan kasus perceraian yang ada di Kabupaten Bima dan khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berdomisili di Desa Simpasai, namun berdasarkan keterangan dari bapak Muhtar, bahwa di pengadilan Agama Kabupaten Bima tidak memiliki data yang spesifik terkait dengan hal tersebut. Pada hari yang sama juga peneliti mencoba untuk meminta data tersebut pada salah satu Panitera Muda, Ibu Marwah, namun kalimat yang sama peneliti dapatkan.

Di Desa Simpasai sendiri berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Bima tahun 2015 ada dua puluh lima (25) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Simpasai, ada Sembilan orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berstatus menikah, delapan (8) orang berstatus janda dan delapan lainnya berstatus belum menikah, sebagaimana di gambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel.V.1.1.2>Nama-Nama Tenaga Kerja Wanita berdasarkan status pernikahan

No	Status	Jumlah	%
1	Menikah	9	36%
2	Belum menikah	8	32%
3	Janda	8	32%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima

Di Desa Simpasai sendiri pada tahun 2015 telah terjadi tiga kasus perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW), dimana tiga orang wanita atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang di ceraikan oleh suaminya (jatuh talak) hal ini diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak kepala Desa Simpasai, bapak Syamsudin, beliau mengatakan bahwa:

“Berdasarkan data yang terhimpun di kantor Desa kami (Simpasai) pada tahun 2015 ada enam (6) kasus perceraian, dimana tiga (3) diantaranya menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) atas nama ibu Nuraini yang bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga (ART) yang diceraikan oleh suaminya atas nama bapak Azis, pasangan ini memiliki dua orang anak yang satu cewek atas nama Intan Nuraini Azis, dan satu cowok atas nama Irfan Azis, alasan perceraian adalah karena masalah ekonomi dan biologis, sebelum bapak Azis menceraikan Istrinya ibu Nuraini, bapak Azis sudah menikah terlebih dahulu dengan seorang wanita atas nama Julhana yang berasal dari Dompu.Kasus perceraian yang kedua yang dialami oleh tenaga kerja wanita di Desa simpasai adalah yang

dialami oleh ibu Rugaya, yang dimadu dan diceraikan juga oleh suaminya atas nama bapak Mawardin, pasangan ini belum memiliki anak karena pada saat itu sang istri pergi setelah satu tahun menikah, menurut bapak Syamsudin alasan bapak Mawardin menceraikan Istrinya adalah masalah Biologis, walaupun pada dasarnya sang istri pergi atas ijin suami, namun sebagai manusia bapak Mawardin juga merasa kesepian sehingga menikah lagi pada tahun 2014 dengan seorang wanita dari Desa Mbuju kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, kemudian pada tahun 2015 menceraikan Istrinya (Talak) yang saat itu bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Saudi Arabia. Kasus perceraian dialami oleh saudari Rosdiana yang bekerja di Malaysia Barat sebagai pembantu rumah tangga, ibu Rosdiana memiliki seorang anak yang kini di asuh oleh kakek dan neneknya.(wawancara 21/07/2016 jam 8:30 pagi).

Berdasarkan keterangan bapak Syamsudin diatas, terlihat bahwa kasus perceraian seakan menjadi hal yang lumrah bagi setiap Tenaga Kerja Wanita (TKW/TKI), masalah kebutuhan Biologis menjadi alasan utam perceraian ditambah lagi dengan perubahan perilaku seorang suami ketika ditinggal bekerja keluar Negeri oleh istrinya.

Kemudian selanjutnya pada tanggal yang sama, peneliti juga mewawancarai langsung bapak Azis sebagai mantan suami dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) atas nama ibu Nuraini, bapak Azis menuturkan bahwa,

“Memang pada awalnya saya memberikan ijin kepada mantan Istrinya untuk bekerja ke luar Negeri karena masalah ekonomi, namun setelah dua tahun istri pergi, saya melihat bahwa anak saya tidak terurus dengan baik, terkadang anak saya diurus oleh kakek dan neneknya namun karena kesibukan kakek dan neneknya sehingga anak sayapun terkadang tidak terurus dengan baik, saat itulah saya mulai berpikir untuk menikah lagi walaupun tanpa ijin istri pertama saya Nur, kata bapak Azis, hingga akhirnya pada tahun 2015 awal tepatnya bulan januari, saya memutuskan untuk menikah dengan Julhana yang menjadi istri saya sekarang, namun beberapa bulan kemudian kabar itu diketahui oleh istri saya Nur dan dia marah sekali kepada saya, sehingga sayapun menjatuhkan talak kepada istri saya itu”(wawancara, 21/07/2016)

Fakta yang berbeda peneliti dapatkan ketika peneliti mewawancarai salah satu tetangga bapak Azis yaitu bapak Yasin, yang masih keluarga ibu Nuraini mantan istri bapak Azis, bapak Yasin mengatakan bahwa,

”Ketika Nur pergi bekerja ke Arab dia sering mengirimkan uang kepada suaminya, namun suaminya sering bermain judi togel dan bola adil, kelakuan suaminya dilaporkan oleh ibu dan bapaknya Nur, sehingga Nur sering kirim uang lewat Ibu dan Bapaknya tanpa sepengetahuan suaminya, setelah hal itu diketahui oleh saudara Azis, diapun marah dan sering berselisih paham dengan mertuanya, beberapa bulan setelah itu Azis menikah lagi dan menjatuhkan talak pada Nur, istri pertamanya yang bekerja di Arab (wawancara 21/07/2016).

Selanjutnya peneliti mewawancarai H.Aher yang merupakan ketua RT 001 yang sekaligus tetangga bapak Mawardin selaku mantan suami dari tenaga kerja wanita atas nama ibu Rugaya yang diduakan dan diceraikan oleh suaminya, peneliti mewawancarai bapak Aher terkait dengan kehidupan bapak Mawardin sebelum menikah dengan ibu Rugaya dan setelahnya, bapak H.Aher menuturkan bahwa:

“Pada tahun 2011 lalu saudara Mawardin sudah memiliki seorang istri atas nama Hardiati yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita juga di Arab Saudi yang sampai sekarang belum pulang dan hilang kabar,saudara mawardin ini juga sudah beberapa kali menikah sebelum menikahi saudari Rugaya, pada tahun 2013 mawardin menikah dengan Rugaya, kemudian tidak lama setelah menikah Rugaya pergi bekerja ke Aab atas ijin saura Mawardin selaku suami, namun tidak lama kemudian setelah Rugaya pergi, terdengar kabar bahwa saudara Mawardin menikah lagi dengan Nurmi wanita di Desa mbuju, dan tidak lama setelah mawardin menikah lagi si Rugaya istri sebelumnya pulang karena mendengar kabar bahwa dia di madu oleh mawardin, dan akhirnya pertengahan tahun 2015 mawardin menceraikan istrinya Rugaya dan memilih untuk hidup dengan Istri barunya (wawancara, 21/07/2016).

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan H.Aher penelitipun mewawancarai saudari kandung dari bapak Mawardin atas nama ibu Mega, berdasarkan wawancara ini, ibu Mega mengatakan bahwa”

“Sebelum kakaknya menikah dengan saudari Rugaya kakaknya sudah menikah dua kali, yang pertama menikah dengan Ifa pada tahun 2008 pada tahun 2011 menikah lagi dengan Harditi, kedua istri sebelumnya sudah dicerai, kemudian pada tahun 2013 menikah dengan Rugaya yang bertahan kurang lebih satu tahun lalu kakak saya menikah lagi dengan seorang wanita di Desa Mbuju atas nama Nurmi (wawancara, 21/07/2016).

Pada tanggal 23 Juli peneliti berhasil mewawancarai ibu Rosdiana, yang kebetulan hari itu berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima untuk mendapatkan bimbingan, karena ibu Rosdiana akan berangkat kembali ke Malaysia Barat sebagai tenaga kerja wanita, peneliti mewawancarai ibu Rosdiana seputar kehidupannya, ibu Rosdiana mengatakan”

“Saya pergi ke Malaysia Barat ini yang keduanya, yang pertama saya pergi ke Malaysia Barat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, saya memiliki satu orang anak laki-laki yang sekarang sudah di asuh oleh kakek dan neneknya, pada tahun 2015 saya bercerai dengan suami saya, saya tidak bisa memberitahu alasan kami bercerai, selama saya menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, saya mengalami perubahan secara ekonomi, saya bisa membeli emas, dan saya juga bisa membangun rumah, dan selama ini saya tidak pernah merasakan program-program dari Pemerintah Kabupaten Bima, dan memang tidak pernah ada, (wawancara 23/07/2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber diatas, dapat peneliti mengambil kesimpulan, bahwa ketidakutuhan keluarga selalu mengintai kehidupan para Tenaga Kerja Wanita, sebagaimana yang terjadi pada ibu Nuraini dan ibu Rugaya, akan ada banyak konsekuensi-konsekuensi yang dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita selama bekerja di luar Negeri sekalipun itu atas ijin keluarga atau suami, perceraian yang diawali dengan perselingkuhan oleh suami adalah bukti nyata yang sudah terjadi pada Tenaga Kerja Wanita (TKW), alasan biologis menjadi alasan utama bagi para suami untuk menikah lagi dengan wanita lain dan itu dilakukan tidak dengan ijin isrti sebelumnya yang bekerja di luar Negeri, keungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Desa Simpasai saja, di Desa lain bahkan di Daerah lainpun hal semacam ini masih berpotensi untuk terjadi.

Ada masalah yang mendasar menurut peneliti terhadap kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagaimana hal di atas, yaitu kesiapan keluarga yang ditinggalkan serta pemahaman tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta keluarga, seharusnya di Kabupaten Bima

secara umum dan di Desa Simpasai secara khusus ada program-program khusus dari Pemerintah Kabupaten Bima sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta keluarganya, seperti program ketahanan keluarga, sosialisasi tentang dampak-dampak dari sebuah migrasi baik oleh seorang istri, suami bahkan seorang anak dengan meninggalkan keluarga mereka dikampung halaman, dengan adanya kegiatan sosialisasi semacam itu tentunya akan membantu para calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar Negeri didalam mempertimbangkan pilihannya, program-program tentang ketahanan keluarga serta sosialisasi tentang dampak-dampak dari sebuah migrasi tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, katakanlah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, akan tetapi harus ada gabungan dari beberapa unsur instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan juga bisa menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra, hal ini tentunya sangat terbuka atau bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk melindungi masyarakat lebih khusus keluarga Tenaga Kerja Wanita dari

beberapa dampak yang kemungkinan menimpa mereka ketika mereka memilih untuk bermigrasi.

Arti penting sebuah keutuhan keluarga harus dipahami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta keluarganya, ini menjadi penting mengingat bahwa keluarga menjadi lingkungan yang sangat mendasar didalam proses pertumbuhan dan perkembangan bagi setiap anggota keluarga yang ada didalamnya. Segala bentuk kejadian serta kondisi dalam keluarga memiliki pengaruh dalam proses berkeluarga atau pembentukan keluarga kedepannya. Ketidakutuhan keluarga tentunya akan berdampak pada relasi anggota keluarga, antara anak dengan orang tua, antara kedua orang tua, antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya serta akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu dengan arti penting sebuah keutuhan keluarga, sudah semestinya ini menjadi perhatian khusus bagi Tenaga Kerja Wanita beserta keluarganya dan juga bagi Pemerintah Kabupaten Bima harus ada proteksi secara dini melalui program-program yang berkaitan dengan keutuhan

keluarga, seperti memperkuat peran seorang bapak sebagai kepala keluarga yang wajib bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa harus bekerja keluar Negeri meninggalkan anak dan istri, serta pemahaman tentang posisi seorang ibu bagi anak dan suaminya, sehingga seorang ibu akan memilih bekerja membantu suaminya di daerahnya sendiri tanpa harus meninggalkan suami serta anak-anak mereka dan Pemerintah Kabupaten Bima juga harus bisa memberdayakan masyarakatnya melalui program pembentukan skill agar masyarakat tidak menjadi tenaga kerja diluar Negeri.

V.1.2. Kehilangan Ibu/Istri

Keluarga yang utuh, hidup dalam satu rumah merupakan dambaan setiap anak, dambaan setiap suami dan istri, apabila salah satu dari anggota keluarga ada yang sakit tentunya anggota keluarga yang lain akan merasa sedih, hal semacam ini tentunya bisa terjadi pada siapa saja dan keluarga siapapun tidak terkecuali keluarga para Tenaga Kerja Wanita (TKW). Memilih menjadi tenaga kerja diluar Negeri tentunya bukan perkara yang mudah bagi para Tenaga Kerja Wanita (TKW), bukan hanya bagi mereka

(TKW) yang sudah memiliki suami dan anak, akan tetapi hal ini berlaku bagi setiap wanita yang memilih bekerja diluar Negeri jauh dari orang-orang yang mereka cinta dan sayang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Kepala Desa Simpasai Syamsudin, beliau mengatakan”

“Bahwa sebagian besar anak-anak dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) diasuh oleh kakek dan neneknya, hanya sebagian kecil saja yang dirawat oleh bapaknya. Menurut pak Syamsudin bahwa anak-anak para Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebenarnya sudah terbiasa hidup dengan kakek dan neneknya, karena orang tua mereka tidak hanya sekali pergi keluar Negeri sudah ada yang sampai berkali-kali pergi keluar Negeri untuk bekerja, hal inilah yang membuat para anak tenaga kerja wanita merasa biasa kala ditinggal oleh ibunya untuk bekerja di luar Negeri (wawancara, 21/07/2016).

Hal tersebut diatas tentunya tidak berlaku bagi semua anak Tenaga Kerja Wanita (TKW), sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang anak Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang pertama peneliti mewawancarai atas nama Junaidi Burhan yang sekarang duduk di kelas 3 SMPN Monta, anak dari ibu Dara Burhan yang pergi bekerja ke Arab Saudi, Junaidi mengatakan”

“Ibun saya sudah dua kali pergi ke Arab Saudi, pertama ibunya pergi pada tahun 2009, pulang dari Saudi tahun

2013 dan kembali pergi ke Saudi pada tahun 2014 sampai sekarang, Junaidi menambahkan walaupun ini bukan yang pertamakalinya saya ditinggal bekerja oleh ibu keluar Negeri dan saya terbiasa hidup dengan kakek dan neneknya, namun saya juga merasa ada yang beda, ada kerinduan yang saya rasakan, ada kesedihan karena tidak bisa makan bersama ibu, tidur bersama dan berlibur bersama ibu seperti layaknya anak-anak pada umumnya, kesedihan Junaidi bertambah ketika ayahnya juga jarang mengunjunginya di rumah kakek dan neneknya, iyapun berharap segera berkumpul lagi dengan ibu dan ayahnya seperti biasa”

Kesedihan yang sama juga diutarakan oleh salah satu anak dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) lainnya atas nama Sanuria Salahudin anak dari ibu Nurfitri Salahudin yang bekerja menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi Sanuria mengatakan bahwa.

“Saya merasa sedih sekali ketika ditinggalkan ibu bekerja keluar Negeri pada tahun 2014 lalu, walaupun saya tau bahwa ibu pergi mencari nafkah untuk saya dan adik saya namun saya tetap merasa kehilangan sosok ibu, saat ini saya hidup bersama adik saya di rumah kakek dan nenek , sedangkan ayah saya bekerja di luar Daerah sebagai buruh kayu, walaupun ibu dan bapak saya sering mengirimkan uang namun saya tetap merasa sedih karena tidak bisa berkumpul bersama orang tua saya, saya merasa kasihan sama adik saya yang selalu menanyakan kepada saya kapan ibu akan pulang. (wawancara, 24/07/2016)

Hal ini dipertegas oleh pengakuan kakek dari Sanuria bapak H.Zakarya, beliau membenarkan bahwa,

“Cucu saya sering menanyakan kedua orang tuanya, lebih lebih ibunya, terkadang Sanuria sering tidak keluar rumah menggurung diri di rumah atau pergi ke ladang apabila lagi ingat sama ibunya karena memang cucu saya Sanuria sebelumnya seri berada di kebun bersama ibunya, pak Zakarya menambahkan bahwa dirinya hanya bisa pasrah dan fokus untuk menyayangi cucunya itu (wawancara, 24/07/2016).

Kehilangan dan kesedihan tentunya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak Tenaga Kerja Wanita semata, akan tetapi seorang suami juga pasti akan merasa sedih dan kehilangan apabila berada jauh dari istri tercinta, walaupun kepergiannya atas ijin suami, namun secara harfiah manusia juga memiliki rasa rindu kala jauh dari istri, seperti yang dirasakan oleh bapak Saleh suami dari ibu Yuniarti yang bekerja di Hongkong sejak tahun 2013 lalu, pak Saleh mengatakan,

“Saya sering merasa kesepian karena sudah tiga tahun tidak berjumpa dengan istri saya, saya juga sadar bahwa istri saya pergi bekerja keluar Negeri untuk membantu saya didalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekarang saya memiliki tiga orang anak, satu cewek dan dua orang cowok, ketiga anak saya juga sering menanyakan kapan ibu mereka akan pulang, hal ini membuat saya semakin merasa sedih, saya terpaksa melakukan peran ganda menjadi seorang ayah sekaligus menjadi seorang ibu bagi anak-anak saya. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini sedikit membantu saya dan anak-anak saya, saya beserta anak-anak saya sering menggunakan Vidio call untuk

berkomunikasi dengan istri saya di Arab Saudi, hal ini sedikit mengobati kerinduan saya dan anak-anak saya, namun saya dan anak-anak tetap berharap istri saya cepat pulang dengan selamat dan berkumpul bersama lagi, istri saya akan pulang pada pertengahan tahun 2017.(wawancara 24/07/2016)

Kehilangan ternyata tidak dirasakan oleh bapak Saleh sendiri, tentunya masih banyak suami yang merasa kesepian dan kesedihan bahkan merasa kehilangan, salah satunya adalah yang dirasakan oleh bapak Sukrin yang ditinggal merantau istrinya ke Malaysia Barat sejak tahun 2015, ini bukan kali pertamanya bapak Sukrin ditinggal merantau oleh istri tercinya Wiwin, pada tahun 2012 lalu pak Sukrin ditinggal merantau istrinya ke Negara yang sama, kemudian pulang dua tahun setelahnya yaitu tahun 2014, namun istri pak Sukrin berangkat lagi ke Negara yang sama pada tahun 2015. Pak Sukrin mengatakan bahwa,,

“Sebenarnya dalam hati kecil saya tidak mengizinkan istri saya untuk pergi lagi karena secara ekonomi kehidupan kami beserta istri dan anak kami tidak terlalu buruk, namun saya tidak bisa menahan keinginan istri saya yang ingin pergi lagi, saya memaklumi keinginan istrinya itu, karena memang istri saya mendapatkan gaji yang lumayan besar di Malaysia. (wawancara, 24/07/2016)

Dari beberapa hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa, sebesar apapun gaji yang diterima oleh

seorang istri diluar Negeri, seihlas apapun seorang suami memberikan ijin kepada istrinya untuk bekerja ke luar Negeri, hal itu tetap tidak akan bisa mengobati rasa rindu seorang suami, semakin lama dan semakin sering seorang istri pergi bekerja keluar Negeri maka akan semakin sering seorang suami merasa kesepian bahkan merasa kehilangan, terkadang inilah yang menjadi salah satu alasan seorang laki-laki/suami menikah lagi dengan wanita lain, karena kesepian serta tidak terpenuhinya kebutuhan biologis seorang suami. Berikut ini adalah tabel jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berstatus menikah dan bermigrasi ke luar Negeri dan meninggalkan suami serta anak mereka di kampung halaman.

Tabel.V.1.2.1.Nana-Nama TKW Yang Berstatus Menikah.

No	Nama TKW	Status	Keterangan
1	Nuraini Azis	Menikah	Ada sembilan (9) orang suami yang harus merasakan kesepian serta merasakan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dari istri mereka karena ditinggal merantau ke luar Negeri.
2	Rugaya Mawardin	Menikah	
3	Miftahul Urip	Menikah	
3	Nurfitri salahudin	Menikah	
4	Ernawati Jain	Menikah	
5	Wiwin Sukrin	Menikah	
6	Dara Burhan	Menikah	
7	Yuniarti Saleh	Menikah	
8	Hardeti Arifin	Menikah	

Sumber : Data Hasil Olah Peneliti Berdasarkan Data Dari Disnakertrans Kabupaten Bima 2015.

Kehilangan juga tidak hanya dirasakan oleh seorang suami, anak-anak yang ditinggal merantau ke luar Negeri tentunya akan merasakan kehilangan karena berada jauh dari ibunya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang hebat bahwa seorang ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya, tidak heran kemudian banyak anak yang terpaksa untuk hidup dengan kakek dan neneknya karena ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya untuk bekerja. Berikut ini adalah tabel jumlah anak Tenaga Kerja

Wanita (TKW) yang ditinggal merantau oleh orang tua mereka (Ibu).

Tabel.V.1.2.2.Nama TKW Dan Jumlah Anak TKW Yang Ditinggal Merantau.

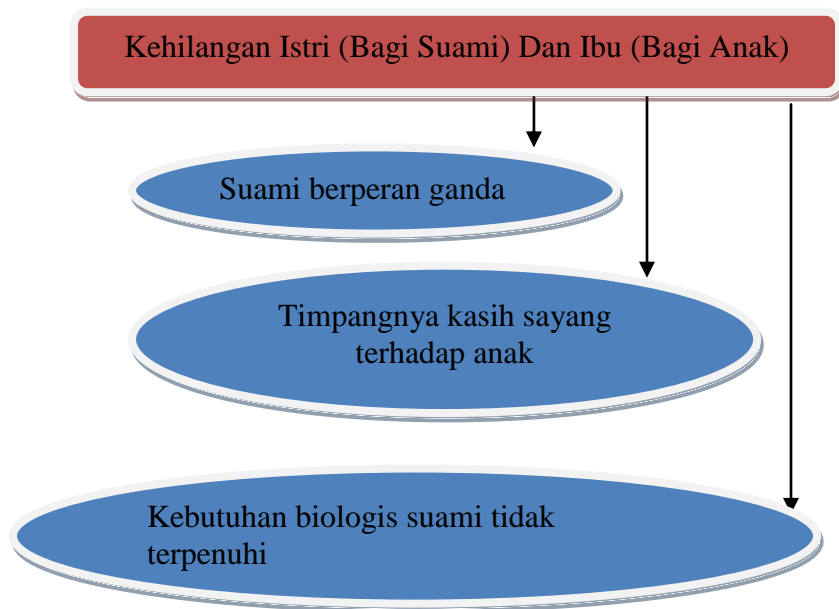
No	Nama	Status	Jumlah anak
1	Nuraini Azis	Menikah	2 Anak
2	Rugaya Mawardin	Menikah	1 Anak
3	Siti hawa	Janda	4 Anak
4	Nurfitri salahudin	Menikah	2 Anak
5	Ernawati Jain	Menikah	2 Anak
6	Lamuria	Janda	3 Anak
7	Evitasari	Janda	4 Anak
8	Juriah	Janda	3 Anak
9	Wiwin Sukrin	Menikah	2 Anak
10	Dara Burhan	Menikah	4 Anak
11	Yuniarti Saleh	Menikah	4 Anak
12	Hardeti Arifin	Menikah	1 Anak
13	Noviyanti	Janda	2 Anak

Sumber : *DISNAKERTRANS Kabupaten Bima 2015 (Diolah Oleh Peneliti).*

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 34 orang anak yang harus merasa kesepian (kehilangan) karena ditinggal merantau oleh orang tua mereka (ibu), hal ini tentunya dampak dari bermigrasinya seorang ibu yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi mereka. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa seorang ibu adalah Madrasah utama bagi seorang anak, jadi kehilangan sosok ibu tentunya menjadi hal yang menakutkan bagi seorang anak, karena dengan kehadiran seorang ibu ditengah keluarga akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi anak dan suami, sebagaimana hal diatas, walaupun anak-anak tenaga kerja wanita di Desa Simpasai sudah terbiasa berada jauh dari orang tuanya, namun sebagai seorang anak mereka tetap merasa sedih, kesepian bahkan merasa kehilnggan sosok ibu, keterbiasaan mereka ditinggal merantau tidak semata-mata membuat para anak-anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) merasa terbiasa, namun dibalik semua itu tersimpan keinginan untuk terus bersamaan dengan orang tua, bapak dan ibu seperti anak-anak yang lainnya tanpa harus terpisah oleh jarak dalam waktu yang lama.

Kebutuhan biologis semacam ini tentunya tidak bisa ditukar dengan materi apapun itu karena hal ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Langkah untuk mencegah hal ini terjadi tentunya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Desa setempat dan juga kerja sama dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus masalah tenaga kerja dengan para calon tenaga kerja itu sendiri, bentuk kegiatannya tentunya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, agar para calon tenaga kerja khususnya Tenaga Kerja Wanita sadar dan tidak memilih menjadi tenaga kerja ketika anak-anak mereka masih dalam masa pertumbuhan, karena itu akan berdampak pada psikologi seorang anak.

Berikut peneliti sajikan hasil temuan di atas dalam bentuk gambar berikut:



V.1.3. Tidak Maksimalnya Fungsi-Fungsi Keluarga.

Setiap pilihan yang dipilih oleh manusia tentunya memiliki konsekuensi tersendiri, ibarat peribahasa “Jangan bermain api apabila tidak ingin terbakar dan jangan bermain air apabila tidak ingin basah”. Peribahasa ini mengandung arti bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi masing-masing. Peribahasa tersebut kiranya seperti apa yang terjadi pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Desa

Simpasai. Pilihan mereka menjadi tenaga kerja di Negeri orang tentunya memiliki dampak atau konsekuensi logis dari pilihan mereka sendiri, seperti ketidakutuhan keluarga, berada jauh dari orang-orang yang selama ini mereka sayang, meninggalkan anak, suami, orang tua serta saudara-saudara di kampung halaman tentunya bukan hal yang mudah bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW), begitupun bagi keluarga yang ditinggalakan berada jauh dan membiarkan anggota keluarga mereka bekerja ke luar Negeri tentunya sangat sulit bagi mereka, namun alasan ekonomi seakan melegitimasi kepergian anggota keluarga mereka untuk menjadi tenaga kerja di Negeri orang.

Ketidakutuhan sebuah keluarga dalam sebuah rumah tangga tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, ada faktor perceraian serta faktor merantau atau bekerja diluar daerah dan luar Negeri dalam waktu tertentu, ketidakutuhan ini tentunya membawa dampak yang buruk bagi anak-anak mereka, hal ini disebabkan karena tidak berjalan secara maksimal fungsi-fungsi keluarga, kehadiran seorang ayah tentunya akan membawa kenyamanan bagi seorang anak dan istri, karena suami adalah

salah satu tempat berteduh bagi keluarganya, suami memiliki peran yang sentral didalam sebuah keluarga, sedangkan kehilangan seorang istri/ibu juga membawa dampak yang yang tidak baik juga bagi keluarga, dimana seorang ibu adalah bagaikan sekolah bagi anak-anaknya, seorang ibu memiliki kasih sayang yang bisa membuat istri dan anak-anaknya merasa nyaman, bahagia. Kelembutan seorang ibu tentunya tidak bisa digantikan dengan materi, seorang anak juga memiliki peran tersendiri dalam sebuah keluarga, karena tidak ada satupun orang tua di dunia ini ingin berada jauh dari anak-anaknya walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Terpisahnya anggota keluarga tentunya akan membawa perbedaan dalam sebuah keluarga, hal ini akan berdampak pada tidak maksimalnya fungsi-fungsi dalam sebuah keluarga, karena memang struktur dalam keluarga (ibu, bapak dan anak) memiliki fungsi dan perannya tersendiri, kehilangan sosok ibu dan bapak tentunya akan mengancam keberlangsungan hidup seorang anak, terlantar seakan menjadi salah satu dampak bagi anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya dan kehilangan seorang

anak juga berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup bagi orang tuanya, karena salah satu tugas seorang anak adalah merawat orang tuanya.

Di Desa Simpasai sendiri belum ada kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang meninggal ataupun mendapatkan kekerasan selama bekerja, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala Desa Simpasai bapak Syamsudin.

“Sejauh ini kami belum menerima laporan bahwa ada salah satu warga kami yang bekerja di luar Negeri yang menjadi korban kekerasan majikan, Alhamdulillah mereka semua baik baik saja, namu ada beberapa anak-anak dari para tenaga kerja kami yang menikah pada usia yang belum pantas (menikah dini) hal ini tentunya akibat kurangnya perhatian orang tua serta keluarga dan juga pergaulan yang tidak terkontrol” (wawancara,26/07/2016)
Tidak maksimalnya fungsi-fungsi keluarga tentunya

dirasakan oleh semua anggota keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar Negeri, berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa anak dan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Simpasai yang bekerja di luar Negeri.

Wawancara pertama dengan bapak Urip, suami dari ibu Miftahul yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sejak tahun 2013, pak Urip menuturkan.

“Saya merasa kesepian setelah istri saya pergi, biasanya saya disiapkan makanan oleh istri, tapi karena istri saya sudah di negara orang saya sering melakukannya sendiri, mulai dari memasak, mencuci membersihkan rumah, terkadang kalau saya terlalu capek saya minta bantuan ke adik adik saya atau tetangga saya untuk membantu saya”(wawancara,26/07/2016)

Selanjutnya wawancara dengan anak dari salah satu tenaga kerja yang berstatus janda ibu Juriah yang bekerja di Arab Saudi atas nama Muhsinin.

“Saya sama adik saya tinggal bersama kakek dan nenek, saya setiap hari membantu kakek dan nenek di sawah, saya kalau makan,tidur selalu di temanin nenek sama kakek, saya kangen sama ibu saya, saya sama adik saya biasanya tidur bersama ibu kini tidak lagi, bapak saya sudah jarang pulang katanya di bekerja”(wawancara, 26/07/2016).

Hal yang sama juga di utarakan oleh salah satu anak dari ibu Siti Hawa atas nama Arfah yang kini duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama, Arfah mengatakan.

“Dulu sebelum ibu bercerai sama bapak dan pergi ke Malaysia untuk bekerja, kami biasa bersama, ke sawah bersama, cari sayur bersama bahkan terkadang saya tidur bareng sama ibu, tapi sekarang saya tinggal sama bapak, ibu bercerai dan pergi ke Hongkong saya jadi sedih tidak ada lagi yang temanin saya untuk mencari sayur, saya

juga tidak tau kapan ibu akan pulang”(wawancara,26/07/2016)

Tidak maksimalnya fungsi keluarga tentunya berdampak pada pola kehidupan atau cara bergaul seorang anak, hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Kasim yang merupakan Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) di Desa Simpasai, beliau mengatakan.

“Sebenarnya di Desa Simpasai tidak ada tradisi menikah kecil atau muda, tapi setelah banyak yang menjadi tenaga kerja wanita nikah muda mulai tumbuh, banyak yang nikah muda kemudian bercerai, menjadi tenaga kerja wanita, bahkan anak anak mereka di titipkan ke kakek dan nenknya, sehingga tidak ada yang mengontrol mereka, bahkan ada yang jadi pencuri, menikah muda juga, sebenarnya secara ekonomi warga Desa disini tidak ada yang terlalu miskin, kenakalan itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua mereka sendiri”(27/07/2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak yang terjadi akibat bermigrasinya seorang wanita (Ibu dan Istri) ke luar Negeri sangat jelas dan bervariasi, tidak maksimalnya fungsi keluarga menjadi salah satunya, karena kehilangan seorang istri akan membawa dampak tersendiri bagi seorang suami, mau tidak mau seorang suami harus menggantikan peran seorang istri dalam hal mengurus

rumah tangganya, peran ganda adalah keharusan bagi para suami ketika ditinggal merantau oleh seorang istri, bahkan tidak jarang dari mereka (Suami) memilih untuk menikah lagi karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Dampak bagi seorang anak tentunya juga sangat jelas, mereka akan kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, karena biasanya seorang anak cenderung lebih dekat dengan seorang ibu daripada seorang bapak, akibat kurangnya kasih sayang dari orang tua inilah sehingga banyak anak yang tidak terurus dengan baik, bahkan ada yang menikah muda, menjadi pencuri dan lain sebagainya.

Dampak lain dari bermigrasinya seorang Ibu bagi anak-anaknya menjadi tenaga kerja diluar Negeri adalah berpindahnya fungsi asuh seorang anak, yang seharusnya seorang anak diasuh oleh orang tua kandung mereka (Ayah/Ibu) berpindah kepada kakek dan neneknya, hal inipun terjadi di keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Simpasai sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel.V.1.3.1.Jumlah Anak TKW dan Keterangan Asuh.

No	Nama	Status	Jumlah anak	Keterangan
1	Syamsiah Usma	Belum menikah	-	-
2	Nuraini Azis	Menikah	2 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
3	Rugaya Mawardin	Menikah	1 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
4	Aisyah Rajak	Belum menikah	-	-
5	Siti hawa	Janda	4 Anak	Bersama Bapak
6	Maimunah Rafik	Belum menikah	-	-
7	Nurfitri salahudin	Menikah	2 Anak	Bersama Bapak
8	Ernawati Jain	Menikah	2 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
9	Nurhasanah Firdaus	Belum menikah	-	-
10	Lamuria	Janda	3 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
12	Evitasari	Janda	4 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
13	Juriah	Janda	3 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek

14	Wiwini Sukrin	Menikah	2 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
15	Sukmawati Zainudin	Belum menikah	-	-
16	Juraidah H.Bakar	Belum menikah	-	-
17	Hariati	Janda	-	-
18	Dara Burhan	Menikah	4 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
19	Yuniarti Saleh	Menikah	4 Anak	Bersama Bapak
20	Hardeti Arifin	Menikah	1 Anak	Bersama Bapak
21	Sriwati H.Muhtar	Belum menikah	-	-
22	Agustina	Janda	-	-
23	Uswatun hasanah Alwin	Belum menikah	-	
24	Noviyanti	Janda	2 Anak	Tinggal bersama kakek dan nenek
25	Miftahul Urip	Menikah	-	-
Total Jumlah Anak TKW Yang Ditinggalkan Dikampung Halaman 34 Orang				

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Berdasarkan Temuan Dilapangan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 34 jumlah anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagian besar di asuh/tinggal bersama kakek dan neneknya, hal ini terjadi karena mereka

ditinggal oleh orang tua mereka, sehingga kasih sayang orang tua kandung mereka tidak bisa mereka dapatkan secara maksimal, serta mereka harus di asuh oleh kakek dan nenek mereka padahal pola asuh yang utama adalah ada pada orang tua kandung mereka, hal ini tentunya dampak dari tidak maksimalnya fungsi-fungsi dalam keluarga (ayah/ibu/anak).

Terlaksananya fungsi-fungsi keluarga menjadi sangat penting untuk pembentukan karakter dalam sebuah keluarga serta didalam perkembangan sebuah keluarga, apabila salah satu fungsi keluarga tidak berjalan maka itu akan berdampak pada perkembangan sebuah keluarga, sebagaimana kasus yang terjadi pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Simpasai bahwa, tidak bisa dihindari dengan bermigrasinya seorang ibu/istri ke luar Negeri berdampak pada tidak terpenuhinya fungsi keluarga yang harus diperankan oleh seorang ibu/atau istri, akibatnya adalah banyak suami yang menikah lagi dengan alasan kebutuhan biologis tidak terpenuhi, seorang anak mencari titik kenyamanan pada hal-hal yang bisa mereka lakukan, misalnya berpacaran bahkan tinggal berdua dengan pacarnya bahkan

sampai menikah muda, mereka hidup dijalan bersama teman-temannya sehingga mereka mendapatkan kenyamanan yang mungkin tidak mereka dapatkan didalam keluarga yang tidak utuh lagi.

Dengan adanya kasus semacam ini menurut peneliti Pemerintah harus hadir agar tidak semakin banyak wanita yang diduakan, suami yang kesepian serta anak-anak terlantar bahkan nikah dini, Pemerintah Kabupaten Bima harus hadir melalui program nyata, seperti mengadakan sosialisasi pentingnya keutuhan sebuah keluarga, melibatkan para orang tua dalam sebuah kegiatan serta menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak mencari kerja ke tempat lain bahkan ke luar Negeri dengan meninggalkan anak serta suami mereka di kampung halaman, tentunya dalam hal ini Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat (Tokoh Agama, Adat, Pemuda dan LSM) dengan membentuk komunitas-komunitas pecinta keluarga misalnya untuk selalu mensosialisasikan arti penting sebuah keluarga. Pemerintah Desa juga harus terlibat didalam mencegah

terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga khususnya rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW).



V.1.4. Kesejahteraan Keluarga Terancam.

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar Negeri tentunya pilihan yang sangat sulit bagi para wanita, karena mereka akan meninggalkan ibu, bapak, suami, anak serta kerabat mereka dalam waktu yang lama, akan tetapi untuk memperbaiki ekonomi serta mensejahterakan keluarga menjadi alasan yang melegitimasi mereka untuk mengambil pilihan itu. Ada banyak resiko yang akan mereka hadapi sebagai Tenaga Kerja Wanita,

seperti perilaku yang kasar dari majikan, gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan, jadi korban perdagangan manusia bahkan menjadi korban kekejaman majikan.

Terkait dengan kesejahteraan sendiri, di Desa Simpasai sendiri secara keseluruhan warganya beda pada level menengah, tidak ada yang terlalu miskin, termaksud para warga yang menjadi tenaga kerja di luar Negeri, hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Camat Monta, bapak Zahrin H. Abubakar, beliau mengatakan bahwa.

“Di Kecamatan Monta secara keseluruhan warga kami tidak terlalu banyak yang berada dalam garis kemiskinan, karena mayoritas warga kami adalah petani, dalam satu tahun kami bisa panen tiga sampai empat kali karena warga kami hampir semua bersawah dan berladang, termaksud di Desa Simpasai, walaupun banyak yang menjadi tenaga kerja di luar Negeri, tetapi sebenarnya mereka memiliki kehidupan yang stabil secara ekonomi, karena beberapa faktor lainlah yang membuat mereka menjadi tenaga kerja di luar Negeri walaupun secara manusiawi juga mendukung sebanyak apapun uangnya yang namanya manusia tidak ada yang merasa pusa, menjadi tenaga kerja di luar Negeri juga sudah menjadi tren sebagian warga kami.(wawancara, 27/07/2016).

Wawancara peneliti juga dengan salah satu staf bagian Pembinaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bapak Umar, beliau mengatakan bahwa.

“Di Desa Simpasai sebenarnya para pencari kerja adalah mereka yang memiliki tanah, baik sawah maupun lading, sebenarnya mereka tidak perlu pergi ke luar Negeri untuk mencari kerja, cukup dengan memanfaatkan tanah mereka untuk menanam padi, bawang atau jagung maka kebutuhan mereka akan terpenuhi, tapi yang namanya manusia itu beda-beda, mungkin mereka ingin mencari pendapatan yang lebih, dan juga bisa jadi mereka ke luar Negeri karena masalah-masalah dalam rumah tangga mereka.
(wawancara, 3/08/2016).

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Ali Rahmat Ikkal S.Sos, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Monta beliau menuturkan.

“Secara umum di Kecamatan Monta ini sebenarnya jarang orang yang miskin, banyak potensi lahan basah dan kering di Kecamatan Monta ini, sama juga seperti di Simpasai, ada beberapa yang bekerja di luar Negeri itu bukan karena mereka miskin, akan tetapi karena mereka terhasut oleh saudara mereka yang pernah bekerja di luar Negeri dengan mendapatkan gaji yang tinggi, sehingga mereka tertarik untuk pergi, ada juga yang karena masalah didalam rumah tangganya bahkan mereka pergi berulang ulang kali ke luar Negeri, bahkan kehidupan para pekerja yang pulang dari luar Negeri cenderung boros (konsumtif), jadi bekerja di luar Negeri seakan menjadi gaya hidup sebagian orang yang ada di Monta termaksud warga di Simpasai.
(wawancara, 3/08/2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya secara ekonomi kehidupan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta keluarganya stabil bahkan mereka bisa

membeli tanah dan membangun rumah dari hasil bekerja di luar Negeri, namun disisi lain kehidupan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) cenderung konsumtif ketika mereka sudah pulang kampung, dan setelah uangnya menipis atau habis maka mereka akan kembali menjadi pekerja di luar Negeri, alasan yang lain juga menjadi faktor pendorong bagi para wanita untuk bekerja di luar Negeri, karena ajakan sahabat atau kerabatnya yang sudah lebih dahulu pergi juga menjadi faktor yang memotivasi.

Tentunya tidak semua Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja diluar Negeri mendapatkan hasil yang sama atau kaya, walaupun secara garis besar mereka mampu memperbaiki kehidupan secara ekonomi, akan tetapi dengan penghasilan yang mereka dapatkan cenderung juga membuat mereka menjadi konsumtif, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima harus hadir melalui program pemberdayaan masyarakat atau program pemberdayaan tenaga kerja pasca bekerja atau setelah mereka pulang ke kampung halaman mereka, programnya tentu yang softskill, bagaimana menjadi wira usaha dengan model usaha yang kreatif yang memanfaatkan Sumber Daya yang ada serta

memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga para tenaga kerja yang pulang dari merantau bisa produktif dengan hasil penghasilan mereka, sehingga para tenaga kerja tidak hanya membuka lapangan kerja bagi dirinya akan tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Sudah banyak contoh di beberapa daerah yang memberdayakan mantan tenaga kerja luar Negeri untuk menjadi produktif di kampung halaman mereka sendiri agar mereka tidak lagi bekerja sebagai tenaga kerja di luar Negeri dengan meninggalkan anak, suami serta keluarganya di kampung halaman, sebagai contoh program Model kewirausahaan pada pemberdayaan Buruh Migran (TKI) di Lombok Barat, NTB, dan juga program pemberdayaan, Pembinaan Kewirausahaan Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, program ini bertujuan memberdayakan para tenaga kerja purna untuk membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya dan orang lain dengan memanfaatkan hasil dari kerja mereka selama mereka bekerja di luar Negeri. Dengan mendorong para mantan tenaga kerja untuk berwira usaha tentunya ini akan menjadi

langkah yang baik untuk mengurangi angka Tenaga Kerja Wanita yang ke luar Negeri dengan meninggalkan anak serta suami bahkan keluarga mereka serta akan mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Bima secara umum dan di Desa Simpasai secara khusus.

V.2. Aspek Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima

Masalah ketenagakerjaan sebenarnya menjadi fokus tersendiri Pemerintah Kabupaten Bima karena Pemerintah Kabupaten Bima sudah menyadari bahwa kualitas tenaga kerja pada berbagai aspek ketenagakerjaan masih rendah sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bima (RPJPD 2006-2025) halaman Sembilan (9) Aspek Sosial Budaya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bima terdapat agenda Pemerintah Kabupaten Bima untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri salah satu fokusnya adalah pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan antara lain untuk menanggulangi tingginya tenaga kerja/masyarakat yang menganggur, rendahnya

kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta belum memadainya perlindungan terhadap termaksud tenaga kerja luar Negeri.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel.V.2.1. Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Bima

Berdasarkan RPJPD 2006-2025.

No	Pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Bima (RPJPD 2006-2025)
1	Penataan kelembagaan ketenagakerjaan termaksud didalamnya peningkatan jaringan kerja dan perangkat hokum bagi perlindungan dan keselamatan serta kesehatan kerja.
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ketenagakerjaan
3	Peningkatan kapasitas tenaga kerja

Sumber: RPJPD Kabupaten Bima 2006-2025.

Berdasarkan penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bima (RPJPD) di atas, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bima sudah memberikan konsentrasi tersendiri terhadap ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bima,

namun tentunya hal ini harus terealisasi dalam sebuah kebijakan/program nyata.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2011-2015), Kabupaten Bima memberikan perhatian juga terkait masalah ketenagakerjaan sebagai bentuk follow up terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bima sebagaimana yang termuat pada agenda agenda peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong investor agar menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bima sehingga akan berdampak pada pendapatan dan kemampuan daya beli serta mengurangi pengangguran.

Untuk aspek Tenaga Kerja Wanita sendiri, di Kabupaten Bima tidak ada kebijakan khusus untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ada hanya kegiatan/ program rutin yang dilakukan setiap tahun dari instansi tentunya dalam hal ini Program Peningkatan Kopetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP) yang disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bima, program ini berlaku secara umum bagi para pencari kerja, sebagaimana hasil wawancara peneliti

dengan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bapak Drs.H.Ishaka pada tanggal 20 juli di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beliau mengatakan.

“Di Kabupaten Bima belum ada program khusus untuk tenaga kerja wanita dan juga keluarganya, yang ada hanyalah program pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja dan itu berlaku secara umum siapapun boleh mengikuti program ini. Untuk tahun selanjutnya kami memang lagi mengusulkan program khusus untuk tenaga kerja asal Kabupaten Bima laki laki dan perempuan baik yang bekerja didalam Negeri maupun yang bekerja di luar Negeri agar ada program khusus untuk mereka”
(wawancara,19/07/2016).

Landasan program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupeten Bima adalah sebagai berikut:

Tabel.V.2.2.Landasan Program Disnakertrans Kabupaten

Bima Tahun 2015

No	Landasan operasional program pelatihan ketenagakerjaan Disnakertrans Kabupaten Bima tahun 2015
1	Peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011-2015
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bima
3	Peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan susunan, kedudukan, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Bima
4	Peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 1 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015
5	Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan program peningkatan kualitas dan prduktivitas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima tahun 2015

Sumber:Disnakertrans Kabupaten Bima (laporan kegiatan pelatihan institusional)

Keterangan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Bupati Kabupaten Bima, Indah Damayanti Putri (IDP) di Pandopo Bupati Bima pada tanggal 2 Agustus, ibu Bupati mengatakan.

“Memang selama ini belum ada program khusus terkait dengan tenaga kerja yang bekerja di luar Negeri, tapi insya allah tahun depan kita akan melakukan pendataan secara rutin dan baik untuk menentukan program khusus untuk mereka, insya allah kami akan mengangarkan dana untuk program mereka kedepannya”(wawancara,13/08/2016)

Hasil wawancara di atas juga diperkuat juga hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di aula kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima atas nama ibu Rosdiana yang saat itu mengikuti kegiatan bimbingan sebelum berangkat bekerja di luar Negeri, ibu Rosdiana mengatakan bahwa.

“Dari Pemerintah tidak ada program khusus yang kami terima, kami hanya di berikan bimbingan sebelum berangkat bekerja saja, semacam yang saya ikuti sekarang ini”(wawancara,19/07/2016).

Dari hasil beberapa wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bima belum ada program yang secara khusus diperuntukan bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW), seperti

program tentang ketahanan keluarga dan lain lain, akan tetapi berdasarkan keterangan dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ibu Bupati Bima, bahwa tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima akan menganggarkan secara khusus untuk program-program yang berkaitan dengan tenaga kerja asal Kabupaten Bima baik laki-lak maupun perempuan.

Program Pemerintah Kabupaten Bima selama ini hanya stagnan pada pelatihan bagi pencari kerja secara umum, akan tetapi setelah para pekerja yang bekerja diluar Negeri pulang tidak ada bentuk follow up dari Pemerintah Kabupaten Bima, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bima bisa memberdayakan mereka agar tidak kembali lagi bekerja ke luar Negeri dengan meninggalkan anak, suami/istri bahkan keluarga mereka. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima harus menyusun program-program yang pro terhadap tenaga kerja secara keseluruhan, harus ada program pemberdayaan baik sebelum atau sesudah mereka bekerja hal ini tentunya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bima.

Di Kabupaten Bima memang belum ada peraturan Daerah yang mengatur tentang adanya program khusus untuk Tenaga Kerja Wanita/keluarganya baik yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ataupun Dinas lain yang saling berkaitan seperti Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, program yang selama ini dilakukan adalah program pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima yang merupakan hasil dari rapat bersama antara Dinas tenaga kerja Kabupaten Bima dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, dan kegiatan pelatihan hanya mencakup pelatihan keterampilan untuk para pencari kerja dengan memberikan modal kepada para peserta setelah mengikuti pelatihan, program ini tentunya baik, akan tetapi belum maksimal dan merata, karena program ini hanya berlaku pada saat masyarakat mencari kerja saja sebagai bekal mereka untuk bekerja, akan tetapi program pemberdayaan bagi masyarakat setelah mereka bekerja (TKI/TKW) tidak ada, sehingga para tenaga kerja hanya akan bergantung pada gaji setiap kali mereka terima tanpa ada keterampilan untuk mengelolan penghasilan (Uang) yang mereka

dapatkan. Oleh karena itu sekali lagi Pemerintah Kabupaten Bima keepannya harus membuat sebuah program yang tentunya ada badan hukum (PERDA) yang mengikat semua instansi yang terkait untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang memeberdayakan tenaga kerja secara keseluruhan dan khususnya bagi mantan tenaga kerja luar Negeri serta program ketahanan keluarga lainnya.

Gambar: Hasil temuan di atas:

Secara garis besar di Kabupaten Bima memiliki fokus tersendiri dalam hal ketenagakerjaan tetapi tidak fokus terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2006-2025 halaman Sembilan (9) Aspek Sosial Budaya.



Selanjutnya tertuang dalam RPJMD 2011-2015, Kabupaten Bima memberikan perhatian juga terkait masalah ketenagakerjaan



Pada realisasinya adalah hanya ada program pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Bima yang secara rutin dilakukan setiap tahun oleh DISNAKERTRANS Kabupaten Bima, tanpa adanya program Khusus untuk tenaga kerja yang bekerja di luar negeri

V.2.1. Adanya Akses Ekonomi.

Salah satu kewajiban Pemerintah daerah adalah menjamin adanya akses ekonomi bagi warga masyarakatnya, tidak terkecuali untuk para Tenaga Kerja Wanita. Di Kabupaten Bima sendiri akses ekonomi secara langsung memang belum ada sejauh ini, yang ada hanya kegiatan atau program pelatihan bagi warga masyarakat yang mencari kerja, walaupun kegiatan ini berlaku secara umum dan tidak khusus untuk Tenaga Kerja Wanita akan tetapi program ini menjadi sebuah wadah bagi para pencari kerja yang ada di Kabupaten Bima untuk mendapatkan skill dalam bekerja sehingga mereka bisa menghasilkan rupiah untuk mereka dan keluarganya.

Pada tahun 2015 sebanyak 128 orang peserta yang berasal dari 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima mengikuti pelatihan kapasitas program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima Drs. Ishaka mengungkapkan,

“Pelatihan berlangsung selama satu bulan atau 240 jam belajar di bengkel UPT. LLK Bima. Cakupan pelatihan

terdiri dari pelatihan terdiri dari 8 paket kegiatan dari 6 kejuruan. Paket tersebut adalah 1 paket Las Listrik, 2 paket pelatihan kejuruan sepeda motor, 2 paket pelatihan kejuruan menjahit, 1 paket pelatihan kejuruan prosesing makanan, 1 paket pelatihan kejuruan tekhnisi handphone dan 1 paket pelatihan kejuruan Tekhnisi Komputer. Setiap paket kejuruan terdiri dari 16 peserta yang berasal dari 18 kecamatan sehingga jumlah keseluruhan peserta pelatihan sebanyak 128 orang. Sumber dana berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dengan anggaran Rp. 273,9 juta . Dana untuk dan kegiatan pengadaan peralatan bagi peserta senilai Rp. 642,5 juta. Selama 30 hari peserta akan dibekali materi penunjang, materi inti, materi evaluasi akhir kegiatan. Pada tahun 2015 karena kami memiliki keterbatasnya sarana dan prasarana di UPT LLK Bima, pelatihan kami dibagi menjadi 2 angkatan yaitu angkatan I berlangsung Selasa, 7 April 2015 sampai dengan 13 Mei 2015 dan angkatan II berlangsung tanggal 7, Mei 2015 sampai dengan 16 Juni 2015. Usai pelatihan para peserta pelatihan akan mendapatkan sarana dan prasarana untuk membuka lapangan kerja mereka kedepanya.(wawancara 24/08/2016).

Berikut ini adalah tabel tentang kegiatan pelatihan ketenagakerjaan di Kabupaten Bima tahun 2015.

Tabel V.2.1.1 Jenis Pelatihan Tahun 2015

Jenis pelatihan TAHUN 2015		Pelatihan			Jumlah kelulusan		Lokasi pelatihan
		Tar get	Realisasi Peserta		L	P	
			L	P			
1	Las listrik	16	16	-	16	-	UPT LLK KAB. BIMA
2	Sepeda motor I	16	16	-	16	-	UPT LLK KAB. BIMA
3	Sepeda motor II	16	16	-	16	-	UPT LLK KAB. BIMA
4	Menjahit I	16	-	16	-	16	UPT LLK KAB. BIMA
5	Menjahit II	16	-	16	-	16	UPT LLK KAB. BIMA
6	Teknisi Komputer	16	16	-	16	-	UPT LLK KAB. BIMA
7	Service HP	16	16	-	16	-	UPT LLK KAB. BIMA
8	Prossesing	16	-	16	-	16	UPT LLK KAB. BIMA
9	Menjahit I(perubahan)	16	-	16	-	16	UPT LLK KAB. BIMA
10	Menjahit II (perubahan)	16	-	16	-	16	UPT LLK KAB. BIMA
Jumlah		160	80	80	80	80	Jumlah yang telah menerima bantuan sarana usaha adalah 409 orang
Total		419	247	162	247	162	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima.

Program ini bertujuan agar para tenaga kerja/pencari kerja bisa bersaing dengan pencari kerja lainnya, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Umar salah satu staf di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, beliau mengatakan.

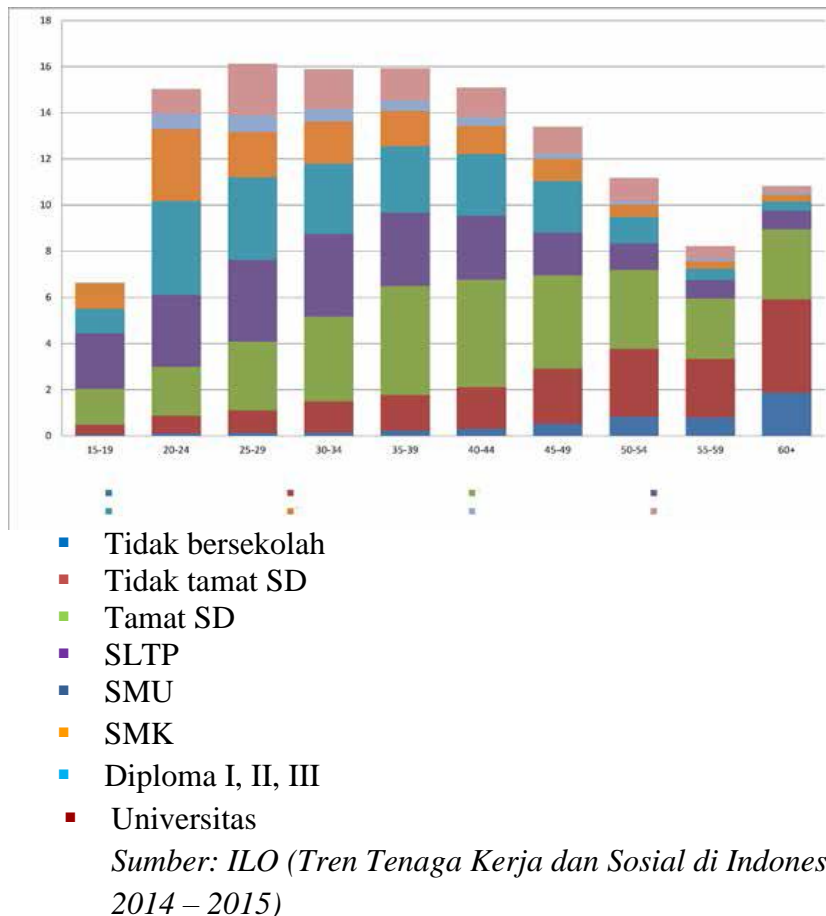
“Tujuan pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas para tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima ini penting untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para pencari kerja yang rata-rata berusia produktif agar dapat bersaing dengan pencari kerja lainnya” (wawancara 23/08/2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bima pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, hal ini dilakukan agar masyarakat Kabupaten Bima yang mencari kerja mendapatkan keterampilan sebagai modal didalam bekerja, akan tetapi menurut peneliti kedepannya harus ada program khusus untuk para pencari kerja yang berminat bekerja di luar Negeri baik laki-laki maupun perempuan, dan jenis pelatihannya harus di sesuaikan dengan apa yang akan mereka kerjakan nantinya di luar Negeri, seperti kursus memasak, mengurus anak, mengurus orang tua dan lain lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari tabel program pelatihan di atas dapat dicermati bahwa, jenis keterampilan yang diberikan sama sekali tidak ada

yang sesuai dengan kebutuhan kerja para Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di luar Negeri, seharusnya ada kursus memasak makanan khas Negara-negara tujuan para tenaga kerja yang diberikan, sehingga para tenaga kerja tidak kesulitan dalam bekerja, ada kursus bahasa asing yang diberikan agar memudahkan para tenaga kerja didalam berkomunikasi dengan majikannya di luar Negeri. Di Indonesia sendiri ketidakcocokan antara jenis keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja Indonesia masih banyak terjadi, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar.V.2.1.1.Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Pekerja Berdasarkan Kelompok Usia, Februari 2015.



Berdasarkan laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial tahun 2014 menyoroti kurangnya pekerja terampil tenaga kerja di Indonesia, ada banyak tenaga kerja Indonesia di luar Negeri, akan tetapi masih banyak yang tidak memiliki soft skill, ini

menunjukkan situasi ketidakcocokan keterampilan antara penawaran dan permintaan akan tenaga kerja. Mengurangi ketidakcocokan keterampilan menjadi penting dalam memperkuat daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia secara umum dan Kabupaten Bima secara khusus. Berbagai bentuk ketidakcocokan keterampilan selalu ada di pasar tenaga kerja dan mengatasi ketidakcocokan ini rumit karena banyak faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Untuk itu, mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang responsif menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini dan membutuhkan partisipasi kuat dari para pemangku kepentingan utama di Negeri ini (Pusat dan Daerah/Legislatif/Eksekutif), termasuk pekerja, dalam mengembangkan sistem keterampilan, serta system informasi pasar tenaga kerja dan layanan penempatan kerja yang efektif.

Dari program Pemerintah Kabupaten Bima di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima belum memiliki cara yang tepat didalam memberdayakan tenaga kerja yang bekerja diluar Negeri, dari program pelatihan tersebut diketahui

bahwa memang Pemerintah Kabupaten Bima tidak mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bima melakukan semacam observasi atau survey tentang kebutuhan tenaga kerja selama mereka bekerja serta kehidupan para keluarga yang ditinggalkan sehingga pada proses pengambilam kebijakan/program nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan mereka.

V.2.2. Adanya Akses Terhadap Pendidikan Bagi Anak-Anak Tenaga Kerja Wanita.

Dengan masih tingginya minat masyarakat bima untuk menjadi pekerja di luar Negeri, karena tenaga kerja Kabupaten Bima memiliki andil yang cukup besar terkait dengan Remitansi tahun 2014 sebesar Rp25,48 miliar (sumber:<http://antaranbtb.com/remitansi-tki-ntb->), walaupun sebenarnya jumlah Remitansi itu gabungan dengan Kota Bima, akan tetapi bisa di prediksi bahwa remitansi Kabupaten Bima lebih banyak dibandingkan Kota Bima karena memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup jauh, oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bima memberikan perhatian khusus baik terhadap para pekerja sendiri

ataupun terhadap anak-anak yang mereka tinggalkan selama bekerja di luar Negeri.

Salah satu program yang harus di prioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bima adalah menjamin akses pendidikan bagi anak-anak para tenaga kerja yang bekerja diluar Negeri, karena memang salah satu konsekuensi logis bagi anak-anak tenaga kerja yang bekerja diluar Negeri adalah terbengkalainya masalah pendidikan, sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan tidak sedikit anak-anak di Kabupaten Bima yang menjadi anak terlantar, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bima tahun 2015 ada Tujuh ratus empat puluh satu (741) anak terlantar yang terbagi berdasarkan jumlah kelamin empat ratus tiga (403) laki-laki dan tiga ratus tiga puluh delapan (338) perempuan, sedangkan jumlah anak yang menjadi anak jalanan sebanyak seratus sepuluh orang (110) dengan klasifikasi enam puluh (60) berjenis kelamin laki-laki dan lima puluh (50) berjenis kelamin perempuan. Berikut ini adalah tabel jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Kabupaten Bima tahun 2015.

Tabel.V.2.2.1.Jumlah Anak Terlantar dan Anak Jalanan di
Kabupaten Bima Tahun 2015

No	Jenis anak	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Anak terlantar	403	338	741
2	Anak jalanan	60	50	110

Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Bima tahun 2015.

Walaupun tidak ada data spesifik tentang apakah anak yang terlantar dan yang menjadi anak jalanan adalah anak-anak dari pekerja di luar Negeri, namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima bapak Drs.Rusdy M.Si, terdapat gambaran bahwa ada beragam latar belakang keluarga dari anak-anak yang terdata oleh Dinas tenaga kerja tahun 2015, ada yang orang tuannya meninggal, keretakan rumah tangga (ayah, ibu bercerai), ada yang ditinggal bekerja ke luar daerah dan luar Negeri oleh orang tuannya bahkan ada juga yang masih hidup dengan orang tuannya dalam satu rumah namun mereka terbawa arus pergaulan dan tidak terurus dengan

baik oleh orang tua mereka. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima yang peneliti tulis ulang.

“Ada banyak latar belakang keluarga anak yang terlantar dan juga yang menjadi anak jalanan, kami sendiri tidak memiliki data spesifiknya, akan tetapi kami sering bertemu dengan mereka di tempat penampungan, sering bertanya tentang keluarga mereka dan apa alasan mereka kok mau hidup jadi anak jalanan dan kenapa mereka bisa terlantar, berdasarkan pengakuan mereka ada yang orang tuanya bercerai, sehingga mereka merasa frustrasi, dan akhirnya keluar dari rumah mereka dan memilih hidup di jalan, ada yang memang ditinggal pergi oleh orang tuanya bekerja di luar daerah dan luar Negeri sebagai tenaga kerja, sehingga mereka bebas bergaul dan tidak terusus pokoknya banyak penyebabnya, kami sendiri belum memiliki data yang spesifik terkait dengan berapa anak tenaga kerja yang bekerja di luar Negeri yang terlantar atau yang menjadi anak jalanan, begitupun dengan jumlah anak dengan latar belakang perceraian, insya allah kedepannya kami akan memperbaiki semuanya.(wawancara,Senin 15/08/2016).

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pencapaian kemakmuran suatu negara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan akses pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) /tenaga kerja secara keseluruhan di Kabupaten Bima, tidak ada program yang khusus untuk anak-anak tenaga kerja yang bekerja diluar Negeri, ada beberapa program pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2015, sebagaimana yang tertulis di laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Ahir Tahun Anggaran 2015, yang peneliti kutip sebagai berikut.

“Untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan merata, serta dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Bima untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas iman dan taqwa, berbudi pekerti yang luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan masa depan, serta mewarisi nilai-nilai luhur masyarakat Bima yang islami. Untuk mendukung urusan pendidikan ini, Tahun 2015 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 49 Milyar lebih melalui beberapa program antara lain :Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Negeri

dan Swasta,Program Pendidikan Menengah,Program Pendidikan Non Formal,Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

Hal diatas juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan mantan kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bima tahun 2015 bapak Drs.A.Jubair, beliau mengatakan.

“Di Kabupaten Bima belum ada program khusus untuk anak-anak dari tenaga kerja yang bekerja diluar Negeri, tapi sebenarnya dalam program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima melalui DIKPORA seperti program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Negeri dan Swasta,Program Pendidikan Menengah,Program Pendidikan Non Formal, semuanya kena, baik itu anaknya petani, pegawai dan juga anak-anak dari para tenaga kerja yang bekerja diluar Negeripun pasti kena, program Pemerintah Daerah untuk semua masyarakat Kabupaten Bima. (wawancara,27/08/2016).

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti diatas dapat diambil kesimpulan bahwa di Kabupaten Bima memang tidak ada program-program pendidikan yang secara khusus diperuntukan untuk anak-anak para Tenaga Kerja Wanita ataupun tenaga kerja pada umumnya baik yang bekerja diluar Negeri maupun yang bekerja didalam Negeri, tetapi program-program

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima bersifat umum, seperti kegiatan wajib belajar sembilan tahun di sekolah Negeri maupun luar Negeri dan juga program pendidikan menengah serta program pendidikan non formal mengakomodasi semua lapisan masyarakat (anak-anak yang ada di Kabupaten Bima) baik yang berlatar belakang keluarganya petani, pengusaha, pegawai bahkan pekerja luar Negeri sekalipun semuanya terakomodasi melalui program-program pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bima terhadap kualitas pendidikan terlihat dari konsistensi untuk melaksanakan program-program pendidikan yang langsung dirasakan oleh masyarakat serta dengan alokasi anggaran senilai Rp.49 miliar.

Hal di atas sesuai dengan apa yang termuat didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bima yang termuat dalam agenda peningkatan sumber daya manusia dengan 21 sasaran pokok diantaranya adalah, pemerataan tenaga pendidik diseluruh wilayah Kabupaten Bima, meningkatkan angka melek

huruh (terutama pada usia 15-24 tahun), tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini secara bertahap, tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan (laboratorium, perpustakaan, olahraga, kesenian dan lain-lain untuk kebutuhan intra dan ekstrakurikuler). Tentunya semua program pendidikan ini bisa dirasakan oleh semua siswa dan siswi termaksud bagi para anak Tenaga Kerja Wanita (TKW).

V.2.3. Adanya Akses Terhadap Pengambilan Keputusan/Kebijakan.

Dengan tidak adanya program khusus untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Bima, sudah bisa dipastikan bahwa akses didalam pengambilan keputusan atau kebijakan sangat minimbahkan mungkin tidak ada sama. Di Kabupaten Bima memang belum ada formulasi atau program-program yang mengarah langsung kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau keluarganya, hal ini menggambarkan bahwa memang akses bagi mereka untuk ikut terlibat didalam menentukan atau menyusun program yang mereka inginkan tidak ada. Sebagaiman hasil

wawancara peneliti dengan beberapa keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai berikut ini:

Pertama peneliti mewawancarai bapak Salahudin suami dari ibu Nurfitri salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Negara Arab Saudi, pak Salahudin mengatakan.

“Setau saya dari dulu tidak pernah ada para TWK/TKI yang di datangi oleh Pemerintah atau di undang oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan usulan untuk program-program tertentu, istri sayapun belum pernah, bagaimana mau di undang programnya saja tidak ada, istri saya hanya mengikuti pelatihan saja sebelum dia pergi ke Arab Saudi, habis itu tidak ada lagi apa-apa”(wawancara 26/07/2016).

Keterangan yang sama juga peneliti dapatkan dari pengakuan bapak Alwin yang merupakan ayah dari salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Hongkong, bapak Alwin menuturkan.

“Tidak pernah ada Pemerintah yang datang ke sini untuk berdiskusi dengan para tenaga kerja wanita yang ada di Desa kami (Simpasai), kami juga tidak tau program apa yang ada untuk anak-anak kami yang kerja di luar, pokoknya selama ini kami tidak pernah lihat Pemerintah datang ke kami para keluarga tenaga kerja untuk buat program”(wawancara,26/07/2016).

Salah satu tokoh muda di Desa Simpasai yang juga merupakan salah satu aktivis yang peduli terhadap Desa Simpasai

bapak Furkan S.Pdi juga menuturkan hal yang serupa beliau mengatakan.

“Pemerintah Kabupaten Bima seharusnya menjadikan masalah-masalah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bima menjadi fokus tersendiri, harus ada program-program yang memang khusus untuk para tenaga kerja/keluarganya, karena tenaga kerja ke luar Negerikan menjadi pahlawan devisa bagi Kabupaten Bima jadi harus ada perhatian khusus, program-program itu tentunya harus dimulai dari mendengarkan apa yang mereka inginkan, datang duduk berdiskusi dengan mereka agar arah kebijakan atau programnya juga tepat nantinya. Sejauh ini yang saya tau bahwa beum pernah ada perwakilan pemerinta Kabupaten Bima yang datang berdiskusi atau mengundang para tenaga kerja/keluarganya untuk berperan dalam proses kebijakan/program, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bima bisa memanfaatkan proses musrembang sebagai sarana untuk menampung semua aspirasi termaksud masalah tenaga kerja.(wawancara,26/07/2016)

Hasil wawancara di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala Desa Simpasai pak Syamsudin, beliau mengatakan bahwa.

“Belum pernah ada kegiatan semacam dialog dengan para keluarga tenaga kerja atau dengan tenaga kerja di Desa Simpasai, setau saya program masuk di Desa inipun belum pernah, bahkan anggota dewanpun belum pernah berkunjung bertemu dengan tenaga kerja ataupun keluarganya.(wawancara, 27/07/2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa, di Kabupaten Bima belum ada akses yang diberikan kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) ataupun keluarganya untuk ikut terlibat didalam perumusan ataupun pengambilan kebijakan, seharusnya ada akses bagi para Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk ikut terlibat agar mereka juga bisa memastikan bahwa apapun kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk mereka adalah kebijakan yang bersumber dari mereka dan untuk mereka, hal ini harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima agar nilai keadilan bisa tercapai, dan tentunya bukan hanya Pemerintah Kabupaten Bima/Eksekutif melalui Dinas tertentu, akan tetapi legislatif juga harus terjun ke lapangan dalam bentuk reses untuk melihat kebutuhan mereka, bagaimana kehidupan keluarga mereka, anak-anak serta anggota keluarga lainnya, dan kegiatan semacam ini harus secara berkala dan konsisten dilakukan agar bisa menjadi kepada masukan pihak eksekutif.

Pemerintah Kabupaten Bima harus mampu menjamin adanya akses bagi para tenaga kerja secara umum untuk terlibat

langsung dalam proses kebijakan, dengan cara membentuk komunitas-komunitas atau organisasi yang mewadahi mereka untuk berekspresi, bertukar pendapat agar nantinya mereka bisa menghasilkan sebuah rekomendasi terhadap Pemerintah tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, dalam hal ini juga Pemerintah harus mendorong Pemerintah Desa untuk ikut memberikan akses bagi tenaga kerja didalam proses Musrembangdes, agar Pemerintah Desa juga bisa ikut berkontribusi, sehingga nantinya program-program yang pro terhadap tenaga kerja/keluarganya bisa terprogram dan terlaksana mulai dari Desa. Pemerintah Kabupaten Bima juga harus melakukan sensus agar bisa mengetahui Desa mana saja yang memiliki jumlah tenaga kerja sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Bima bisa mendorong Desa tersebut untuk memberdayakan tenaga kerja/keluarga tenaga kerja melalui sebuah program yang nyata.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, berikut ini peneliti sajikan hasil temuan-temuan di atas.

